



## Transformasi Pengelola SISKEUDES Berbasis Teknologi dan *Good Corporate Governance* Desa Tulun Baumata Utara

Antonius Yohanes William Timuneno<sup>a,1\*</sup>, Maria Goreti Malut<sup>a,2</sup>, Adiutrix Maria Irayanti Seran<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

<sup>1</sup> antoniustimuneno@unwira.ac.id\*

Informasi artikel : ABSTRAK

*Received: 2 Agustus 2024;*

*Revised: 16 Agustus 2024;*

*Accepted: 20 Agustus 2024.*

Kata kata kunci:

SISKEUDES;

Transformasi Teknologi;

Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik.

Program pengabdian masyarakat (PkM) ini akan berfokus untuk mengembangkan tata kelola keuangan lewat sosialisasi yang intensif terkait penerapan SISKEUDES dan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) di kantor desa Tulun Baumata Utara. PkM ini bertujuan untuk memberikan dorongan pembaharuan sistem tata kelola keuangan pada setiap perangkat kerja dan mendorong pemahaman good corporate governance. Dalam realisasinya terdapat respon baik dari mitra yang menanggapi secara antusias untuk merefleksikan secara konkrit penerapan kedua aspek ini. Temuan lainnya adalah beberapa permasalahan substansial diantaranya permasalahan mengenai kualifikasi keilmuan yang minim dari pengelola SISKEUDES serta minimnya pemanfaatan aplikasi SISKEUDES secara intensif. Dalam penerapan GCG, terdapat juga beberapa permasalahan substansial mulai dari kurang komunikasi interaktif antara pihak pemerintah desa dan masyarakat dalam merealisasikan pengelolaan keuangan desa dan juga sarana untuk evaluasi akhir pelaksanaan program yang kurang efektif untuk dalam realisasi prinsip GCG di pemerintah Desa Tulun. Jika pembenahan bahkan pelatihan dan sosialisasi tidak dilakukan secara intensif, maka upaya pemaksimalan fitur-fitur aplikasi SISKEUDES untuk menunjang kinerja operasional desa tidak akan terimplementasi secara baik.

### ABSTRACT

Keywords:

SISKEUDES;

Technological

Transformation;

Good Corporate

Governance.

*The Implementation of the RASKIN Program for Improving the Welfare of Underprivileged Communities in Kebong Village, Sintang. This community service program (PkM) will focus on developing financial management governance through intensive socialization related to the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) and the application of good corporate governance (GCG) principles at the Tulun Baumata Utara village office. The aim of this PkM is to encourage the renewal of financial management systems within each working unit and to promote an understanding of good corporate governance. In its implementation, there was a positive response from partners who enthusiastically reflected on the concrete application of these two aspects. Other findings include several substantial issues, such as the low level of educational qualifications of SISKEUDES managers and the insufficient utilization of the SISKEUDES application intensively. In the application of GCG, there are also several substantial issues, including the lack of interactive communication between the village government and the community in realizing village financial management, and the inadequacy of facilities for the final evaluation of the program's implementation, which hinders the realization of GCG principles in the Tulun village government. Without intensive corrective actions, training, and socialization, the effort to maximize the features of the SISKEUDES application to support the village's operational performance will not be effectively implemented.*

Copyright © 2024 (Antonius Yohanes William Timuneno, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Timuneno, A. Y. W., Malut, M. G., & Seran, A. M. I. (2024). Transformasi Pengelola SISKEUDES Berbasis Teknologi dan Good Corporate Governance Desa Tulun Baumata Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 131–140. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v4i2.2431>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dewasa ini tuntutan pembaharuan sistem tradisional menjadi sistem berbasis digital terus diupayakan secara intensif guna memenuhi arus perubahan dalam tata kelola kinerja perangkat desa (Suherry & Belly, 2024). Salah satu bentuk perubahan sistem tata kelola perangkat desa yakni sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang merupakan sistem terintegrasi untuk menanggulangi pelaporan keuangan di sektor pemerintahan desa (Malahika et al., 2018; Fathia & Indriani, 2022; Ridwan, 2019). SISKEUDES secara intensif telah disosialisasikan untuk diterapkan dan dipelajari oleh seluruh perangkat desa yang bertugas di pemerintah desa termasuk pemerintah desa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). SISKEUDES menjadi alat atau media yang substansial bagi terciptanya sistem pemerintah desa yang profesional, efektif dan efisien serta bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan desa itu sendiri (Kusuma Adi & Baroroh, 2021).

Dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diasumsikan bahwa segala urusan pemerintahan masyarakat desa diotorisasikan kepada seluruh perangkat desa sebagai pihak koordinator yang meregulasikan dan membentuk sistem terintegrasi yang pada akhirnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. SISKEUDES yang merupakan *support system* (sistem pendukung) menjadi substansi paling konkrit untuk menggambarkan hubungan proporsional antara orientasi dalam undang-undang No. 6 dan tujuan konkrit hadirnya SISKEUDES itu sendiri yang secara bersama-sama terfokus pada keinginan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lewat hadirnya sistem tata kelola keuangan yang sistematis dan berbasis teknologi (Pamungkas, 2016).

Dalam laporan pertanggung jawaban keuangan lewat SISKEUDES, setiap transaksi ekonomik dalam kegiatan pemerintah desa wajib diakumulasikan dan dimasukkan sebagai input dalam membentuk laporan keuangan (Riswandi, 2021). Asumsi ini dipertegas lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta barang dapat dimasukkan sebagai kategori yang perlu diolah dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan ini juga wajib mencantumkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggung jawaban desa. Segala bentuk pertanggung jawaban ini harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melihat *progress* keuangan desa secara sistematis dan terperinci (Tuti Dharmawati et al., 2021).

Berdasarkan peraturan tersebut, penegasan terkait kemampuan untuk mampu menganalisis transaksi ekonomik pemerintah desa, kemampuan menerapkan sistem keuangan desa (SISKEUDES), sampai pemenuhan kewajiban pelaporan menjadi kemampuan utama yang harus dimiliki oleh perangkat desa selaku pihak pelaksana atau inisiator kesejahteraan masyarakat desa (Pertiwi, 2022; Sinta, 2023; Wanda, 2024). Ketentuan ini bersifat wajib dikarenakan kompetensi dasar terkait keuangan sektor publik dan kemampuan mengaplikasi SISKEUDES sampai pemahaman regulasi terkait keuangan pemerintah desa dapat disimpulkan sebagai suatu acuan dasar dalam memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan tersebut (Panjaitan et al., 2023).

Namun tuntutan diatas menjadi kontradiktif jika melihat arus perkembangan literasi keuangan di Indonesia sampai tahun 2019 yang hanya berkisar 27,82% (SNLIK OJK, 2020). Kondisi literasi keuangan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bagaimana perkembangan arus pemahaman literasi keuangan di Indonesia. Perkembangan yang tidak terlalu signifikan menganalogikan ketercapaian pemahaman keuangan dari segi edukasi yang masih sangat minim tidak terkecuali para perangkat desa. Hal ini secara konkrit terjadi pada perangkat desa di kantor Desa Tulun Baumata Utara Kecamatan Taebenu yang diperburuk dengan kualifikasi 15 orang termasuk diantaranya perangkat desa beserta kepala masing-masing rayon yang memiliki kualifikasi pendidikan masing-masing perangkat desa bergelar Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase mencapai 56%. Kondisi ini didukung dengan hasil survey KSDA dimana jumlah masyarakat Desa Tulun Baumata Utara yang berkisar 1.630

---

Jiwa dengan rata-rata masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA (Balai Besar KSDA, 2014).

Perkembangan arus SDM di Desa Tulun Baumata Utara yang secara kualifikasi tidak mempunyai cukup menjadi alasan tidak terimplementasi dengan baik SISKEUDES di kantor Desa Baumata Utara. Hal ini juga berimplikasi terhadap tidak terbentuknya kantor Desa yang mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* (GCG) sebagai prinsip kerja dalam kantor desa tersebut. GCG didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan *value added* (nilai tambah) untuk semua *stakeholders* (Monks *et al*, 2003). Dimana terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu dan kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Monks, 2003). Konsep ini jika dikomparasikan dengan substansi pemerintah desa maka pemerintah desa dianggap sebagai entitas dan masyarakat sebagai *stakeholders*. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah desa (kantor desa) memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan informasi kepada pemerintah pusat selaku pihak pemberi dana. Selain itu pemerintah desa juga bertanggung jawab kepada masyarakat selaku pihak yang memiliki kepentingan dari kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa wajib memvisualisasikan pertanggung jawaban tersebut dalam suatu laporan keuangan yang diperoleh dari sistem tata kelola keuangan terintegrasi menggunakan perangkat sistem seperti SISKEUDES (Sofyani & Ardiyanto, 2022).

Situasi diatas semakin diperburuk dengan kondisi sistem tata kelola keuangan pemerintah Desa Tulun yang lebih intens menggunakan sistem tata buku tradisional (*manual*) dibandingkan penerapan sistem SISKEUDES. Melalui sistem *manual*, bendahara merekapitulasi setiap komponen pemasukan dan pengeluaran transaksi keuangan pada pemerintah desa Baumata Utara lewat satu bentuk laporan berbasis manual (direkap per transaksi seperti catatan harian). Sistem ini secara konkrit memiliki banyak kekurangan yang tentunya berimplikasi terhadap bentuk laporan keuangan yang tidak sistematis termasuk diantaranya kelemahan dari segi kompleksitas informasi yang di rekap bahkan informasi yang dihasilkan tidak mampu menggambarkan bagaimana arus perputaran kas Desa Baumata Utara secara sistematis baik arus kas pemasukan dan arus kas pengeluaran. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip laporan keuangan yang harus mewakili unsur objektivitas informasi dan *measurement unit* (kesatuan pengukuran) (Muhammad Syukri Nasution, 2017). Kedua substansi ini mengutamakan relevansi nilai dan kesesuaian standar dalam pelaporan keuangan sehingga jika tidak ada dukungan sistem yang tersistematis maka unsur objektivitas yang memiliki nilai transparansi dan kesatuan pengukuran tidak akan mampu terpenuhi. Berdasarkan ketentuan objektivitas dan *measurement unit* maka secara substansial sistem kerja keuangan pemerintah Desa Baumata Utara tidak menunjukkan kesesuaian isi konten dan orientasi sistem tata kelola keuangan yang objektif dan *valueable* berdasarkan prinsip GCG.

Dengan hadirnya SISKEUDES permasalahan substansial dari sistem tata buku tradisional (*manual*) yang diterapkan di kantor desa Baumata Utara harusnya mampu ditanggulangi dengan baik karena SISKEUDES menerapkan sistem rekapitulasi transaksi harian dan menghasilkan output yang terintegrasi dengan setiap komponen jurnal harian yang diupload sehingga usaha preventif untuk mencegah adanya kekurangan data keuangan bisa ditanggulangi dengan baik. Selain itu SISKEUDES merupakan sistem yang juga mampu menampung segala bukti transaksi mulai dari nota dan bukti – bukti pembayaran lain yang sah menurut ketentuan SAP (Daffa & Herwiyanti, 2023).

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas maka program pengabdian masyarakat ini akan berfokus untuk mengembangkan tata kelola keuangan lewat sosialisasi yang intensif terkait penerapan SISKEUDES dan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) di kantor desa Baumata Utara. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah memberikan dorongan pembaharuan sistem tata kelola keuangan pada setiap perangkat kerja dan mendorong pemahaman *good corporate governance* sebagai

substansi pemahaman yang wajib secara intensif di inkulturasi dalam sistem kerja di Kantor Desa Tulun Baumata Utara. Selain tujuan tersebut, harapan yang menjadi tujuan akhir dalam merealisasikan program ini adalah transisi siklus kerja setiap pemerintah desa yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya perubahan pola pikir setiap perangkat desa dalam wilayah Provinsi NTT terkait sistem tata kelola yang berbasis digital maka pembaharuan sistem ini akan mampu mendorong arus perubahan pada sistem yang lebih transparan dan sistematis serta lebih terbarukan (*update*). Kondisi ini tentunya akan mendorong nilai positif atas kinerja operasional setiap pemerintah desa di wilayah Provinsi NTT dan akan menambah *value* yang berimplikasi terhadap peningkatan *benefit* pemerintah desa di wilayah Provinsi NTT dan juga peningkatan kesejahteraan akan mampu terealisasi dengan baik lewat pembaharuan sistem tata kelola keuangan yang lebih baik.

## Metode

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan pada kantor Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu berfokus pada pemberian pemahaman terkait pentingnya implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan pemahaman terkait *good corporate governance* (GCG) dalam sistem kerja Kantor Desa tersebut. Objek atau sasaran dalam program pengabdian masyarakat ini adalah setiap perangkat desa di kantor desa Baumata Utara dengan maksud agar pemahaman terkait kedua substansi ini menjadi pemahaman teknis dan konseptual sebagai stimulus pemahaman setiap perangkat desa dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu dengan pemahaman (pengetahuan) yang didistribusikan kepada seluruh perangkat desa maka akan terjadi restrukturisasi kembali sistem kerja berbasis digital dengan mengubah pola institusional yang berbasis GCG dan setiap perangkat desa mampu menjadi kreator terealisasinya hal tersebut. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut: (1) Sosialisasi (Penyuluhan) (2) Pendampingan realisasi SISKEUDES dan pendampingan perancangan sistem kinerja berbasis *good corporate governance* (GCG) (3) evaluasi program.

## Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian ini menggunakan metode pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan SISKEUDES dan pengaplikasian prinsip *Good Corporate Governance* untuk merealisasikan pemahaman teknis dan sistematis sesuai ketentuan pengaplikasian SISKEUDES. Dalam merealisasikan pelatihan SISKEUDES secara intensif, tim menggunakan aplikasi SISKEUDES versi V1.2.RI.0.6 yang dikelola dan diawasi pengaplikasian di desa – desa Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Kabupaten Kupang. Aplikasi SISKEUDES ini cenderung sangat memudahkan dalam pelaporan keuangan dan mendukung pertanggung jawaban desa karena dirancang dengan menggunakan fitur – fitur yang *integrated*, sederhana dan *friendly use* sehingga pengguna akan lebih mudah dalam menggunakan aplikasi – aplikasi ini. Selain itu SISKEUDES dengan versi ini telah dilengkapi dengan fitur *Built In Internal Control* sehingga akan mudah bagi BPKP dalam melakukan pengawasan bahkan akan mudah dikontrol oleh internal desa. Versi terbaru dari SISKEUDES ini merupakan pengembangan BPKP yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Wilma & Hapsari, 2019).

Selain itu dalam merealisasikan pelatihan terkait prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan beberapa indikator untuk memahami prinsip ini diantaranya transparansi, akuntabilitas, dan *responsivness* terkait pengelolaan dana desa atau alokasi dana desa yang diukur diadaptasi dalam penerapan pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab. Indikator – indikator ini merupakan indikator yang paling reliabel dalam melakukan pengukuran implementasi GCG dalam sistem pemerintahan desa dewasa ini (Wardani & Fauzi, 2022). Indikator – indikator diaplikasikan secara substansial dengan menggunakan unsur – unsur yang dapat dilihat pada tabel 3 ini.

Tabel 1. Indikator – Indikator *Good Corporate Governance* PkM Pemerintah Desa Tulun

No	Indikator	Substansi	Sumber
1	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses perencanaan yang dilakukan pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan</li> <li>2. Proses pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Proses keterlibatan tim pelaksanaan dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan</li> <li>4. Proses pertanggung jawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan</li> </ol>	Eko <i>et al.</i> , (2016)
2	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pelaporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan da rencana kegiatan dana desa.</li> <li>2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.</li> <li>3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa</li> <li>4. Bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksana dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan</li> </ol>	
3	<i>Responsiveness</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses daya tanggap dari tim pelaksana terkait proses perencanaan penggunaan dana desa</li> <li>2. Proses daya tanggap tim pelaksana dalam menampung saran masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa</li> <li>3. Kemampuan tim pelaksana dalam menerima laporan pengawasan yang telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa</li> <li>4. Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggung jawab atas hasil laporan pengawasan yang diberikan masyarakat</li> </ol>	

Dalam merealisasikan kedua substansi diatas melalui program pelatihan terdapat respon baik dari mitra yang menanggapi secara antusias dengan memberikan pertanyaan substansial untuk merefleksikan secara konkrit penerapan kedua aspek yakni pemahaman teknis SISKEUDES dan prinsip GCG yang dapat dilihat melalui gambar dokumentasi di bawah ini.



Gambar 1. Sosialisasi dan pemaparan secara intensif penerapan Sistem Keuangan Desa

Pada proses sosialisasi penerapan sistem SISKEUDES yang dilaksanakan pada hari pertama ditemukan beberapa situasi yang dapat memperkuat asumsi permasalahan mengenai kualifikasi keilmuan yang minim dari pengelola SISKEUDES dari perangkat Desa Tulun serta minimnya pemanfaatan aplikasi SISKEUDES secara intensif. Hal ini ditandai dengan pemaparan personal SISKEUDES bagi mitra, dan situasi ini secara konkrit mendukung asumsi umum mengenai permasalahan kualifikasi ilmu yang umumnya menjadi permasalahan substansial yang terjadi di beberapa daerah khususnya desa dalam penerapan SISKEUDES. Seperti hasil observasi yang dilakukan Priyadi et al., (2023) dalam program PkM untuk penerapan SISKEUDES di desa Bicornong Pemekasan. Diketahui bahwa permasalahan paling dasar dalam penerapan SISKEUDES terletak pada bagaimana memaknai dan menginterpretasi modul pengaplikasian SISKEUDES yang harus didukung oleh kompetensi keilmuan. Hal ini melekat pada pihak pengelola keuangan desa, karena secara substansial ilmu dan praktik adalah dua hal yang saling mengikat (Akrom, 2021). Jika membenahan bahkan pelatihan dan sosialisasi tidak dilakukan secara intensif, maka upaya pembelajaran secara otodidak mengenai penerapan SISKEUDES termasuk pemaksimalan fitur – fitur aplikasi ini untuk menunjang kinerja operasional desa tidak akan terimplementasi secara baik (Rivan & Ridwan Maksun, 2019). Oleh karena itu dalam program PkM ini tindak lanjut yang diberikan adalah mengupayakan pelatihan SISKEUDES oleh BPKP Kabupaten Kupang di masa yang akan datang untuk mensinergikan pemahaman penerapan SISKEUDES dan *outcome* SISKEUDES yang diharapkan oleh BPKP Kab. Kupang pada pemerintah Desa Tulun. Rencana tindak lanjut ini merupakan efek dari adanya tuntutan pengaplikasian SISKEUDES yang tercantum dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dimana, diasumsikan bahwa SISKEUDES adalah alat analisis kebutuhan desa yang akan mengungkap kebutuhan desa, alokasi dana desa yang memenuhi aspek transparansi dan kredibilitas.

Pada hari penerapan sosialisasi prinsip GCG dilakukan terhadap mitra dan hasil sosialisasi menunjukkan adanya feedback yang positif dari kegiatan ini. Hal ini dapat dibuktikan lewat dokumentasi pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Sosialisasi prinsip *Good Corporate Governance* Di Kantor Desa Tulun

Pada hari kedua tim mengajak mahasiswa dalam mengaplikasikan program PkM untuk melakukan sosialisasi terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini dimaksudnya untuk memenuhi aspek Indikator Kinerja Utama terkait keikutsertaan mahasiswa sebagai anggota untuk

medapatkan pengalaman diluar kampus khususnya terkait praktik GCG pada aparat pemerintah desa.

Dalam penerapan sosialisasi pada hari kedua justifikasi terhadap indikator penerapan prinsip GCG di desa tulun dapat digambarkan dari hasil observasi sebagai berikut; Pada aspek Transparansi, proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, bersama dengan partisipasi masyarakat, menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Beberapa unsur transparansi telah diimplementasikan, namun terdapat temuan bahwa pemerintah desa Tulun kurang mensosialisasikan program jangka panjang kepada masyarakat. Selain itu, informasi terkait dengan inkonsistensi tujuan program tidak dievaluasi dan bahkan tidak diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa lebih sering melakukan evaluasi ketercapaian perencanaan program kerja serta mengadakan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan program, termasuk evaluasi terkait permasalahan substansial.

Pada aspek Akuntabilitas, proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana desa sudah sebagian diimplementasikan, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satu temuan yang signifikan adalah bahwa Pemerintah Desa Tulun belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang tersistematis, yang disebabkan oleh kurangnya penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebagai perbaikan, pemerintah desa diharapkan dapat memberdayakan SISKEUDES secara maksimal dengan mendukung pelatihan, sosialisasi, dan upaya-upaya peningkatan kompetensi lainnya bagi pihak pengelola SISKEUDES.

Pada aspek Responsiveness atau daya tanggap, meskipun beberapa unsur telah diterapkan, masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi dan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa Tulun dinilai kurang interaktif dalam mengkomunikasikan realisasi dana desa, yang ditandai dengan pelaksanaan evaluasi program yang umumnya tidak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat melakukan evaluasi pelaksanaan program secara lebih inklusif dan tidak hanya sekedar menyediakan banner realisasi dana desa sebagai sarana informasi.

Dengan perbaikan pada ketiga aspek tersebut, diharapkan implementasi Prinsip GCG di desa Tulun dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan informasi dapat diketahui bahwa penerapan prinsip GCG secara substansial telah diterapkan oleh pemerintah Desa Tulun namun terdapat beberapa permasalahan substansial mulai dari kurang komunikasi interaktif antara pihak pemerintah desa dan masyarakat dalam merealisasikan pengelolaan keuangan desa yang maksimal. Selain itu permasalahan pengelolaan keuangan desa dan sarana untuk evaluasi akhir pelaksanaan program yang kurang efektif juga menjadi permasalahan dalam realisasi prinsip GCG di pemerintah DesaTulun. Namun terlepas dari situasi diatas, arah penerapan prinsip GCG secara substansial telah diupayakan terealisasi pada pemerintah Desa Tulun meskipun pada hakikatnya para aparat desa sendiri belum tentu memaknai hal ini sebagai penerapan prinsip GCG. Hasil pelaksanaan program pengabdian ini mendukung asumsi dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiati et al., (2020) yang melakukan kajian penerapan GCG pada 12 desa di Kelurahan Ngesrep Kota Semarang yang mengasumsikan bahwa perlahan arah perkembangan desa – desa telah mengarah pada desa modern yang sarat akan penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* yang ditandai dengan penerapan eco – green cultural, financial risk management dan peraturan – peraturan penunjang kinerja operasional desa. Hal ini secara konkrit menunjukkan adanya independensi yang kuat pada desa Tulun dan inisiatif untuk memperbaharui sistem tata kelola pemerintah desa Tulun yang jauh sistematis dan terstruktur. Selain itu diharapkan masyarakat lebih di ikut sertakan dalam realisasi pengelolaan dana Desa Tulun agar implementasi sistem GCG dapat berjalan maksimal dengan tidak menanggalkan masyarakat yang merupakan pion penting penerapan GCG yang maksimal (Dewantoro & Rachmawati, 2020)

---

---

## Simpulan

Dalam merealisasikan program pelatihan terdapat respon baik dari mitra yang menanggapi secara antusias dengan memberikan pertanyaan substansial untuk merefleksikan secara konkrit penerapan kedua aspek yakni pemahaman teknis SISKEUDES dan prinsip GCG. Namun situasi ini tidak didukung oleh beberapa permasalahan substansial diantaranya permasalahan mengenai kualifikasi keilmuan yang minim dari pengelola SISKEUDES dari perangkat Desa Tulun serta minimnya pemanfaatan aplikasi SISKEUDES secara intensif. Jika membenah bahkan pelatihan dan sosialisasi tidak dilakukan secara intensif, maka upaya pembelajaran secara otodidak mengenai penerapan SISKEUDES termasuk pemaksimalan fitur – fitur aplikasi ini untuk menunjang kinerja operasional desa tidak akan terimplementasi secara baik. Sedangkan untuk penerapan prinsip GCG, secara substansial telah diterapkan oleh pemerintah Desa Tulun namun terdapat beberapa permasalahan substansial mulai dari kurang komunikasi interaktif antara pihak pemerintah desa dan masyarakat dalam merealisasikan pengelolaan keuangan desa yang maksimal. Selain itu permasalahan pengelolaan keuangan desa dan sarana untuk evaluasi akhir pelaksanaan program yang kurang efektif juga menjadi permasalahan dalam realisasi prinsip GCG di pemerintah Desa Tulun. Namun terlepas dari situasi diatas, arah penerapan prinsip GCG secara substansial telah diupayakan terealisasi pada pemerintah Desa Tulun meskipun pada hakikatnya para aparat desa sendiri belum tentu memaknai hal ini sebagai penerapan prinsip GCG. Oleh karena itu dalam program PkM ini tindak lanjut yang diberikan adalah mengupayakan pelatihan SISKEUDES oleh BPKP Kabupaten Kupang di masa yang akan datang untuk mensinergikan pemahaman penerapan SISKEUDES dan *outcome* SISKEUDES yang diharapkan oleh BPKP Kab. Kupang pada pemerintah Desa Tulun.

## Ucapan Terima Kasih

Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program yang diinisiasi oleh pihak dosen program studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Desa Tulun Baumata Utara Kecamatan Taebenu. Tim mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini terkhususnya bagi pihak universitas yang telah menyediakan pendanaan bagi kegiatan PkM dan pihak Pemerintah desa yang telah memberikan kesempatan bagi tim dalam melakukan kegiatan PkM. Secara khusus tim mengucapkan terima kasih bagi kepala desa yang telah bersama – sama dengan tim merealisasikan suatu upaya pengembangan ekonomi secara edukatif secara bersama – sama perangkat aparat desa.

## Referensi

- Akrom, A. H. (2021). *Abdul Hayyi Akrom, Dosen Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor 665*. 4(1), 665–677.
- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(4), 425–444. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i4.4127>
- Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTT. 2014. Balai Besar KSDA NTT-<http://bbksdantt.menlhk.go.id/profil/wilayah-kerja>
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Dewantoro, B., & Rachmawati, M. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sebagai Perwujudan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 01(10), 76–83. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/147>
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 455-468).

- Kusuma Adi, F., & Baroroh, A. (2021). Pelatihan Siskeudes Perwujudan Efektivitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Jatipurno. *Jurnal Al Basirah*, 1(1), 37–44. <https://doi.org/10.58326/jab.v1i1.2>
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Muhammad Syukri Nasution. (2017). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Desa Bandar Khalipah). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/JAKS/article/view/11197/5195>
- Pamungkas, B. A. (2016). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang implementation of the post-regulation autonomy of village number 6 of 2014 concerning Village. *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019*, 2(2), 210–229.
- Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 1200–1209.
- Pertiwi, H. (2022). *Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dan Dukungan Atasan Terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Ditinjau Dalam Persepektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Are Kab Ogan Komering Ulu Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Priyadi, I. H., Halida, U. M., Ardiansyah, F., & Faiqoh, N. (2023). Pelatihan akuntansi keuangan desa berbasis SISKEUDES sebagai upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan. *Pêrdikan: Journal of Community Engagement*, 5(1), 17–26. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/perdikan/article/view/8063%0Ahttp://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/perdikan/article/download/8063/3485>
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 08 Mei 2018. BN.2018/No. 611, [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id) : 43 HLM
- Ridwan, M. A. (2019). *Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Riswandi, A. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rivan, A., & Ridwan Maksam, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Sinta, A. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa (Studi: Desa Kayu Batu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sofyani, H., & Ardiyanto, I. (2022). Determinan Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 149–165. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.18424>
- Suherry, S., & Fajar Saputra Belly, M. S. T. (2024). *Manajemen Pembangunan Desa Yang Efektif*. CV. Azka Pustaka.
- Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan. 2020. Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DataLinkDesc/SNLIK>
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS : Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 05 April 2003. LN.2003/No.47, TLN NO. 4286, LL SETNEG : 20 HLM
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 September 2014. LN.2014/No.7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>

- Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>
- Wanda, R. (2024). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- World Bank. 2005. *Coorporate Governance Country Assesment: Republic Of Indonesia*. Jakarta: 2005